

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

***EMPOWERMENT GOVERNMENT TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
PASAR TUAH SERUMPUN DI KECAMATAN TUALANG PERAWANG
KABUPATEN SIAK***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Dandi Jimpramanda

NPM : 167310146

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “*Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak*”, dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Dr. Zainal, Sos., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Azirman dan Ibu Desnilawati yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Terimakasih kepada Sherinda Amelia Putri, S.Si yang telah mendampingi penulis dari SMA dan Inshaallah Till Jannah yang telah banyak membantu

dan mendengarkan keluh kesah penulis selama perkuliahan sampai proses penulisan skripsi ini.

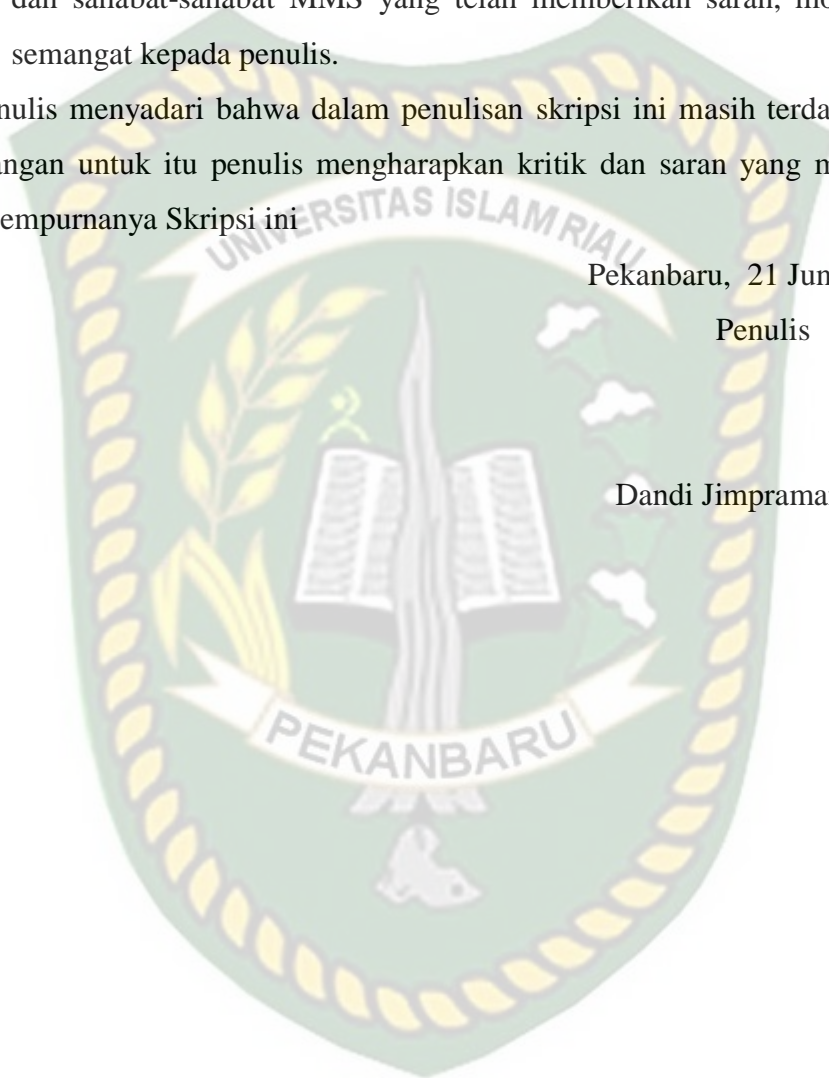
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 dan sahabat-sahabat MMS yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya Skripsi ini

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Penulis

Dandi Jimpramanda



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	8
A. Studi Kepustakaan.....	8
B. Kerangka Pikir Penelitian.....	22
C. Konsep Operasional.....	23
D. Penelitian terdahulu.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisa Data	35
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	35
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	37
A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	37
B. Keadaan Penduduk Kabupaten Siak.....	41
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Siak	43
D. Visi Misi Dinas Pasar Kabupaten Siak.....	44
E. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Siak.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Identitas Responden	46
B. <i>Empowerment Government</i> Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Tuah Serumpun Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	48
C. Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi Dalam <i>Empowerment Government</i> Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Tuah Serumpun Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	66
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 70



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 : <i>Empowerment Government</i> Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang perawang kabupaten Siak	25
II.2 : Penelitian Terdahulu Terkait <i>Empowerment Government</i> Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang perawang kabupaten Siak	26
III.1 : Informan Dalam Penelitian <i>Empowerment Government</i> Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang perawang kabupaten Siak	33
III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian <i>Empowerment Government</i> Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang perawang kabupaten Siak.....	36
IV.1 : Kecamatan Di Kabupaten Siak.....	37
IV.2 : Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Siak.....	38
IV.3 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Siak.....	40
IV.4 : Sungai-Sungai Yang Bermuara Di Kabupaten Siak.....	41
IV.5 : Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2015-2017.....	42
V. 1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	47
V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka pemikiran Tentang <i>Empowerment Government</i> Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang perawang kabupaten Siak.....	22



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dandi Jimpramanda
NPM : 167310146
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak

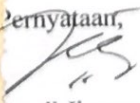
Atas naskah yang didaftarkan pada ujian usuaan penelitian ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secaya syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Januari 2020



Pernyataan,

Dandi Jimpramanda

**EMPOWERMENT GOVERNMENT TERHADAP PEDAGANG
KAKI LIMA PASAR TUAH SERUMPUN PERAWANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Dandi Jimpramanda

167310146

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa di lakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan diatas kekuatan sendiri. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian primer yaitu Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak, Pemerintah Kecamatan Tualang, Ketua PPKL dan juga pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian di analisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil analisa data dapat diketahui bahwa Pemerintah kecamatan tualang dan juga Dinas pasar sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal, pihak terkait juga harus terus berinovasi dalam memberdayakan PKL pasar buah serumpun. Pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun sudah di lakukan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin akan tetapi masih saja ada hambatan yang di hadapi oleh pemerintah kecamatan tualang dalam pemberdayaan. Maka dari itu pemerintah harus lebih sering lagi memperhatikan kemajuan yang ada di pasar buah serumpun setelah di lakukannya pemberdayaan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pemerintah, PKL

**EMPOWERMENT GOVERNMENT FOR LOCAL STREET
VENDORS PERAWANG SERUMPUN MARKET, KECAMATAN
TUALANG, SIAK DISTRICT**

ABSTRACT

Dandi Jimpramanda

167310146

Empowerment is a process that runs continuously to improve the ability and independence of the community in improving their standard of living, that effort can only be done by awakening their empowerment, to improve life above their own strength. This type of research is field research and the nature of this research uses an approach. qualitative. Primary research data sources are the Head of the Siak Regency Market Service, the Tualang District Government, the Head of PPKL and also street vendors. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation of this research using inductive data analysis techniques, namely based on specific facts, then analyzed and finally found solutions to general problems. Based on the results of data analysis, it can be seen that the Tualang sub-district government and also the market office have carried out empowerment but not maximally, related parties must also continue to innovate in empowering the tuah allied market street vendors. The government has done the empowerment of street vendors in the tuah serumpun market as well as possible, but there are still obstacles faced by the Tualang sub-district government in empowerment. Therefore, the government must pay more attention to the progress in the fortunate allied market after empowerment is carried out.

Keywords: Empowerment, Government, PKL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan para pedagang kaki lima menimbulkan berbagai konflik pro-kontra, konflik antara pedagang dengan pemerintah setempat dan konflik antara pedagang dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima dianggap menjadi solusi alternatif bagi mereka dari keterpurukan ekonomi. Namun, keberadaan pedagang kaki lima membuat masyarakat menjadi resah, karena sering kali mereka lupa akan fungsi asli dari dibuatnya fasilitas umum berupa trotoar, mereka yang biasa dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL). Mereka sering kali terlihat menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Selain membuat para pejalan kaki menjadi kurang nyaman, keberadaan pedagang kaki lima juga mengurangi kualitas dan citra ruang publik. Padahal, fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi untuk memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Siak sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman maka dituntut peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memenuhi kepentingan pemerintah Daerah dan pedagang, maka diperlukan peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dari pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatas, pemerintah Kecamatan Tualang Perawang membuat suatu pedoman ataupun acuan dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana pemerintah Kecamatan Tualang Perawang ingin melakukan pengalokasian tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang lebih layak, supaya lebih tertata dan tertib dalam melakukan penjualan. Maka dari itu pemerintah Kecamatan Tualang Perawang telah menyediakan tempat yang cukup memadai untuk pengalokasian Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kecamatan Tualang Perawang ini.

Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di pasar tradisional sehingga dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Beberapa belakangan ini, bisnis makanan kaki lima menjelma menjadi salah satu tren yang berkembang dimasyarakat khususnya masyarakat kelas menengah kebawah. Keunikan tempat yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima (PKL) berkembang menjadi sarana atau media interaksi antar masyarakat ditiap lapisan golongan. Pelayanan yang mengangkat konsep kesetaraan (*equality*) atau kesamaan pelayanan pada tiap konsumen menjadi kekuatan utama bagi bisnis ini. Namun terlebih itu, tren tersebut dinilai belum mampu mengatasi ancaman terhadap keberadaan PKL.

Pasalnya, citra negatif malah makin menguat pada PKL karena beberapa masalah yang ditimbulkan.

Dinamika kehidupan pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang selalu di bayangkan nasib yang tidak menentu akibat dari adanya suatu kebijakan, dan perlakuan diskriminatif oleh aparat Pemerintahan Kecamatan Tualang. Seharusnya Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tualang tidak lagi menganggap keberadaan pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun sebagai masalah kota, akan tetapi dapat merangkul dan memberdayakan mereka sebagai mitra Pemerintahan Kecamatan Tualang terutama dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyediaan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang *relative* terjangkau namun apabila kita melihat pada kenyataan yang ada bahwa, Pemerintahan Kecamatan Tualang tidak menganggap keberadaan mereka sebagai masalah kota yang di anggap telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keindahan kota serta mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat (Rendra: 2011).

Pasar Buah Serumpun kecamatan Tualang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini di sebabkan karena sebagian besar pedagang kaki lima belum mengetahui tentang peraturan daerah yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 tahun 2007, yang di sebabkan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh Pemerintah Kecamatan Tualang sehingga mereka kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai pedagang kaki lima. Hambatan yang di hadapi dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Tualang antara lain kurangnya pengetahuan tentang perda no 12 tahun 2007, belum tersediannya sara dan

prasarana yang memadai, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat, terbatasnya anggaran, kurangnya program-program pemberdayaan, kurangnya kerjasama dengan pihak terkait dan kurangnya jumlah personil.

Padahal bila dikembangkan, PKL dapat menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendongkrak perekonomian dimasa depan. Lebih khusus dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kota atau dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik. PKL menyimpan potensi pariwisata. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didesain dengan baik. Apalagi dengan jumlah PKL yang begitu besar di Indonesia saat ini, yaitu sekitar 54 juta PKL yang tersebar diseluruh Indonesia bisa jadi PKL akan memiliki peranan yang strategis dalam perbaikan ekonomi 2013. Bahkan selama ini, peranan PKL ini telah sangat terlihat dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun M Biomed mengatakan keberadaan PKL telah membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pasalnya dari 25 juta unit PKL yang terdaftar di seluruh Indonesia telah menyerap sebanyak 90 juta tenaga kerja (Tri: 2013).

Namun pengembangan potensi PKL tidaklah mudah, hal itu mengingat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL itu. Dampak negatif itu diantaranya adalah pengurangan kualitas lingkungan sekitarnya, hilangnya fungsi trotoar untuk pejalan kaki, dan terganggunya ketertiban jalur transportasi. Bahkan tak jarang, PKL dianggap sebagai salah pengganggu ketertiban dan kenyamanan

masyarakat. Keberadaan komunitas sektor informal pedagang kaki lima (PKL) merupakan realita perekonomian kota dan perlu mendapat perhatian secara memadai dalam proses pembangunan. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan PKL sering menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota, misalnya menimbulkan permasalahan kebersihan lingkungan dan keindahan, kesemrawutan lalu-lintas, potensi konflik yang relatif besar dan sebagainya. Namun demikian, PKL mempunyai kontribusi yang berarti bagi perekonomian masyarakat, terutama pada saat semakin sempitnya lapangan kerja. PKL perlu ditangani atau ditata secara terpadu melibatkan semua pihak yang berkepentingan, manusiawi, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas PKL.

Namun ihwal pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui program Pengembangan Kinerja Pasar di Pasar Tuah Srumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Telihat keadaan di lapangan peneliti menemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Kurangnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas UPTD Pasar dan Kecamatan Tualang Perawang. Terbukti dengan masih banyaknya PKL yang masih berjualan secara liar.
2. Kurangnya pendanaan yang di miliki oleh Dinas UPTD Pasar dan pihak Kecamatan dapat dilihat dari kurangnya lahan dan fasilitas yang ada di pasar tuah serumpun
3. Rendahnya tingkat kepedulian PKL terhadap Program Pengembangan Kinerja Pasar

Atas dasar tersebut penulis tertarik melakukan peneitian dengan judul.

Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Empowerment* yang di lakukan oleh *Government* terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat di dalam melakukan *Empowerment Government* terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Perawang?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk mencari apa saja faktor-faktor yang menghambat fungsi *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tualang.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

- a. Aspek teoritis penelitian ini di harapkan sangat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasa Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak.
- b. Aspek akademis untuk menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan untuk memperbanyak ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
- c. Aspek empiris memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Siak pada umumnya Pemerintah Kecamatan Tualang khususnya dalam mengambil suatu kebijakanyang berkaitan dengan masalah peneltian.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul ‘*Empowerment Government* terhadap pedagang kaki lima Pasar Tuah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak’ maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005 : 36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Nurcholis (2004 : 178-179) pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi : (1) memberikan pelayanan atau servis baik pelayanan perorangan maupun pelayanan public/khalayak. (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan (3) memberikan perlindungan/potensi masyarakat

Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan (Nugroho, 2003 : 36).

Apabila ditinjau dari definisi pemerintah, Syafie (2005 : 20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang perintah memiliki ketaatan.

Rasyid (2002 : 14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantarawarga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi. Didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Ndraha (2003 : 76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan sekunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang perintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan social masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal. Dijalankan oleh semua bangsa dan Negara diseluruh dunia, baik Negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. Fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pengetahuan social dan humaniora, dan diaplikasikan secara luas, baik dibidang privat, public maupun social. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi tariff hidup, semakin kuat *bargaining position* dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Menurut Hasibuan dalam Salpian, Ifan. dkk (2011 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Yahya (2006 : 95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang berpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, seperti dinyatakan Sri Maulidiah (2014 : 3).

Lebih lanjut dinyatakan oleh Ndraha (2003 : 6), bahwa; “Pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah atau publik. Oleh karena itu, Pemerintahan adalah sebuah sistem multi program yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Menurut Pranadjaja (2003 : 24) “Hubungan antara instansi pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah “.

2. Konsep *Empowerment*

Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dan berhasil bila menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat. Suharto (2005 : 67) menyrankan 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal;
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya;
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah;
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas tugas kehidupannya; dan
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy (2002 : 314-315) mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, *maintaining* sebagai berikut:

1. *Enabling*, di artikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan
2. *Empowering*, mengandung mengandung pengetahuan bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih di perkuat lagi. Pendekatan yang di tempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat prtecti, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Menurut Suharto (2005 : 59), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007 : 2) pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu kesadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Selanjutnya Pranarka & Priyono (Dalam Sedarmayanti, 2000 : 79) mengatakan bahwa pengertian pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu: (1) Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. (2) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang disengaja dan direncanakan secara terus menerus serta memiliki tujuan, yaitu mereka yang diberdayakan memiliki akses untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber yang ada.

Pemberdayaan menurut Suhendra, (2006 : 74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara *evolutif* dengan keterlibatan semua potensi”.

Menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005 : 169) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain

Menurut Papilaya (2007) bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Kartasasmitha (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan menurut Aritonang (2001) yaitu pemberdayaan sebagai usaha untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya) potensi, sumberdaya masyarakat agar membela dirinya.

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006 : 74-75) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.

Pemberdayaan menurut Ife (dalam Suhendra, 2006 : 77) adalah “meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*)”.

Sedangkan menurut Widjaja (2003 : 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Adisasmita (2006 : 35)” Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan yang lebih efektif.

Menurut Sumaryadi (2005 : 11) pemberdayaan masyarakat adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan meliputi 3 hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan memperkuat kemandirian (Kasim dan Karim,2006).

Empowerment adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sehingga dalam proses pemberdayaan tersebut, orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup dapat mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain Alfianti (2014).

Irsyadi (2008), menyatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) dapat di maknai sebagai upaya memberi *power* kepada *powerless*, yaitu masyarakat *marginal Power* diartikan kekuasaan dan kekuatan dalam *empowerment*.

Menurut Prijono dan Pranaka, pemberdayaan mengandung dua arti pengertian yaitu yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian yang pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah

memberikan kemampuan atau keberdayaan sert memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu (Dalam Suryana, 2010).

Daulay (2006), menurutnya pemberdayaan adalah upaya yang di lakukan untuk mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar sehingga mampu menjadi pelaku dalam proses pembangunan yang partisipatif dan aktif.

Slamet (2003), *empowerment* adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Arti ini secara tidak langsung pemberdayaan diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan memanfaatkan peluang sehingga mampu mengambil suatu keputusan yang tepat sesuai dengan inisiatifnya.

Sumodiningrat (2000), arti pemberdayaan (*empowerment*) adalah serangkaian dukungan untuk mendapatkan kemampuan serta memperluas segala akses kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan.

3. Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang baik (BAPENAS, 2008 : 9) istilah *good governance* mengandung makna tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Secara sederhana *governance* dapat diartikan sebagai proses dari suatu pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut

diimplementasikan. Konsep *governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, *government governance*, dan *local governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable*) pada publiknya. *Good governance* adalah, penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (*state, private sector and society*).

Kooiman (2000), mengemukakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Pengertian tata kelola pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kualitas pemerintah daerah saat ini dan ke depan ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan inti dari kualitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan keuangannya (Dedi Kusmayadi : 2005).

Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga

sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.

Saifuddin (2004) Indonesia adalah penyelenggara pemerintah yang baik yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil, oleh karena itu *Good Governance* akan tercipta di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan yang memiliki keseimbangan dalam proses *Checks and Balance* dan tidak boleh satu pun di antara mereka yang memiliki kontrol absolute.

Menurut Tulis (2000), perubahan terhadap sumber daya manusia sebesar 10 persen saja dapat mengubah struktur organisasi, selain perubahan yang disebabkan faktor teknologi, ekonomi, politik, dan sosial.

Wahab (2002 : 34) *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara

administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas kewirausahaan.

Governance atau tata kelola bukanlah *Government* atau pemerintah, walaupun pemerintah di tingkat manapun memiliki potensial menjadi bagian dari proses tata kelola Bryant (2018)

Keping (2018) dimasa sekarang, dimana banyak terjadi perubahan besar, percepatan globalisasi, dan peningkatan ketidakpastian, maka tata kelola selayaknya untuk disesuaikan dengan zamannya, sehingga dapat menimbulkan keuntungan dan daya saing ekonomi yang tinggi,serta dapat meningkatkan substansial dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Istilah tata kelola atau *governance* masih jarang di pakai dalam komunitas sebelum akhir 1980an. Namun, peningkatan popularitas istilah *governance* sangat berhubungan dengan peran pemerintah atau *government* dalam usaha untuk pengembangan dan pembangunan dan pengelolaan ekonomi suatu negara secara efektif dan efisien. Nag (2018)

Menurut Mustopadidjya (2000 : 12) agar lembaga di daerah mampu untuk melaksanakan Good Governance, perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) memiliki struktur sederhana, dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara arief,efisien, Dan efektif

- 2) mengembangkan hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Memahami dan komit akan manfaat dan anti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam satu keterpaduan serta sinergi dalam pencapaian tujuan.
- 4) Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian menanggung resiko, berinisiatif, partisipatif yang telah di perhitungkan secara realistis dan rasional.
- 5) Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (Kode Etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dan di junjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani.
- 6) Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, inklusif, mudah di jangkau, equatable, tidak bermuka dua, tidak menerapkan standar ganda profesional. Tidak memihak dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

Menurut Tjokroarnidjojo (2000 : 75) mengemukakan bahwa *good governance*, khususnya dalam kata *good/baik*, berintegritas dari pelaksanaan *governance* itu apabila *governance* baik dalam pemerintahan, badan usaha maupun kegiatan organisasi masyarakat.

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang

baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah di perkenalkan oleh pemerintahan indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah di tetapkan standar internasional Sutedi (2011 : 3).

Menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik.

Agoes (2011 : 101) mengatakan bahwa sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Tata Kelola Pemerintahan yang baik juga di sebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif Widodo (2001 : 18)

Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *service*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat di tinjau dari

apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya, Lemabag Administrasi Negara (2000 :1)

4. Konsep Pedagang Kaki Lima

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 feet atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Fakultas Ekonomi Unpar, dalam Widodo, 2000 : 27).

Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Dalam Sari, 2003 : 27).

Menurut Yeung (2000 : 25) memberikan pengertian pedagang kaki lima sama dengan hawker, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

Karafir (Dalam Soemitro, Styastie 2002 : 10), menyatakan bahwa “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat

umum seperti di tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah.

Pedagang kaki lima adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan Sugiharsono (2000 : 45).

Pedagang kaki lima adalah orang atau badan membeli , menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk di jual diserahkan , atau dikirim kepada orang atau badan lain , baik yang masi berwujud barang penting asli , maupun yang sudah dijadikan barang lain Widodo (2008 : 285-286).

Pedagang kaki Lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingirpingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perengkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha Silalahi (2009 : 112).

(Soemadi, 2002). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa pedagang kaki lima menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha pedagang kaki

lima ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya.

Pedagng kaki lima adalah orang-orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksi-penjualan barang-barang/jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu di lakukan pada tempat-tempat yang di anggap strategis dalam suasana informal Eridian (Dalam Sudaryanti : 2000).

Pedagang kaki lima ialah pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa relatif kecil, modal sendiri atau modal lain, baik mempunyai tempat berdagang tetap atau tidak tetap (berpindah-pindah) ditempat-tempat yang terlarang untuk berjualan (Fakultas Hukum UNPAR Dalam Sudaryanti : 2000).

Sumarsono (2009 : 307) Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang banyak terlihat dikota-kota negara berkembang seperti Indonesia, Banyak penelitian berpendapat bahwa PKL adalah ciri kota-kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti PKL timbul dari keadaan sosial ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan.

Poerwadarminata (2009), dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberi pengertian tentang pedagang yaitu orang yang berjualan, dari pengertian yang di berikan ini maka dapat di artikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan. Pedagang kaki lima adalah setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di trotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau tempat lain yang bukan peruntukannya. Pedagang Kaki Lima sering juga di sebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, emperan-emperan toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lainnya yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

Menurut Nugroho (2003 : 159) Pedagang Kaki Lima atau di singkat PKL adalah Istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang di peruntukkan untuk pejalan kaki.

Menurut Damsar (2002 :51) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dlam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotar, pinggir jalan, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah di pindahkan, di bonhkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Pedagang Kaki Lima adalah sebagai *hawkers* yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual di tempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani, layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri di atas kaki sendiri (Soeryanto, 2009 :89)

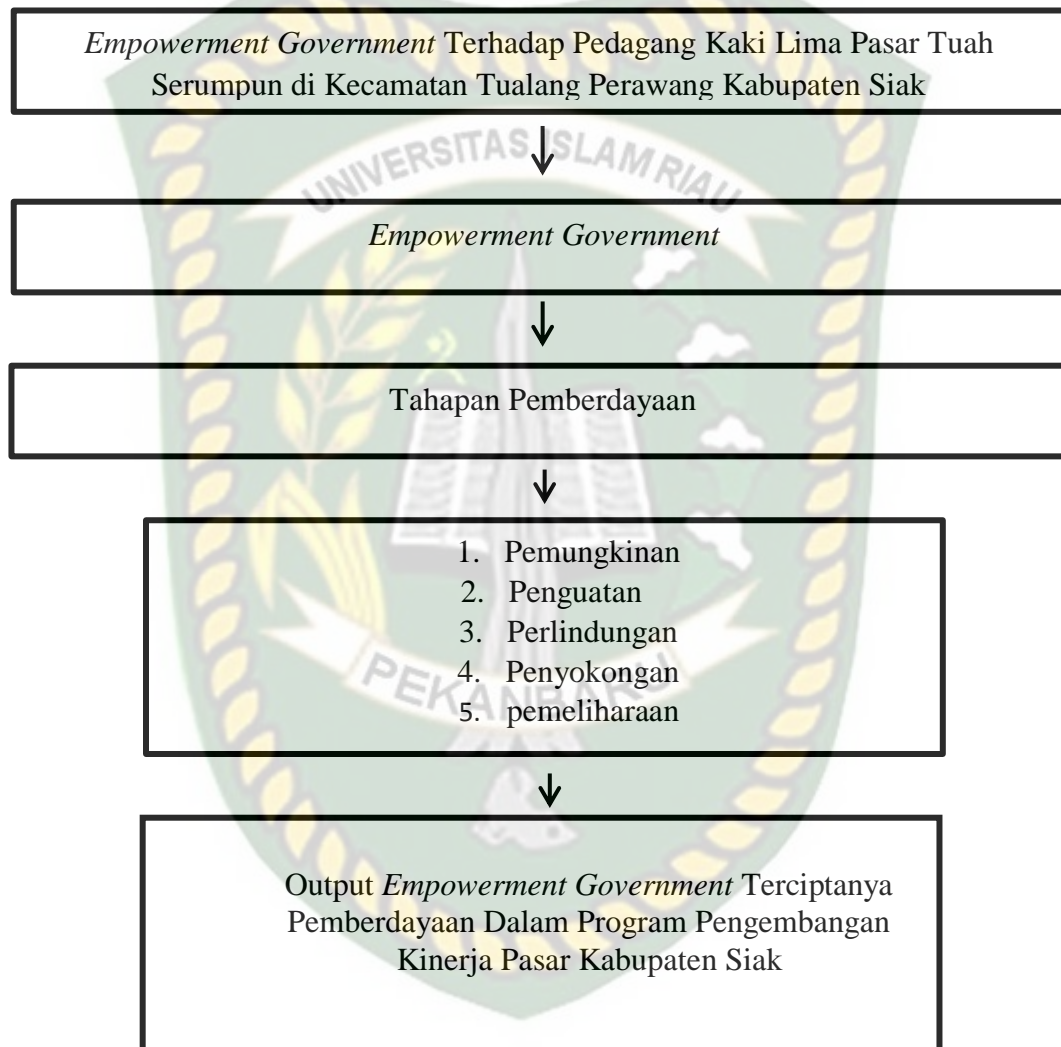
Chandrakirana dan Sadoko (2005 : 73) yang mendefinisikan PKL sebagai mereka yang di dalam usahanya mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukan tempat usaha serta tempat lain yang bukan miliknya.

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang Kaki Lima adalah orang-orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Sinambela, 2008 : 14)

Pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Di atas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat dengan dua kaki pedagang kaki lima di tambah tiga roda kereta dorong itulah mereka kemudian dikenal dengan sebutan pedagang kaki lima.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Gambar II.1 Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Penulis 2019, Menurut Teori Soeharto (2005 : 67)

C. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam peneliti ini, maka akan di jelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian di uji melalui teknik pengukuran.

Adapun konsep-konep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.
2. *Empowerment* adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
3. PKL adalah adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop.
4. Tahapan pemberdayaan adalah suatu siklus kegiatan pemberdayaan yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk merubah kearah yang lebih baik.
5. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
6. Penguatan adalah upaya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
7. Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari

terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

8. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas tugas kehidupannya.
9. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.



Tabel II.1 Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Suharto (2005 : 59) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai, proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjukan pada keadaan atau hasil yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial.	<i>Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak</i>	1. Pemungkinan 2. Penguatan 3. Perlindungan 4. Penyokongan 5. Pemeliharaan	a. Berkembangnya potensi pedagang kaki lima b. Sumber daya pendukung a. Pemahaman pedagang mengenai pemberdayaan b. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pedagang kaki lima dalam pemberdayaan pedgag a. memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap pedagang kaki lima dan masyarakat b. dampak terhadap pedagang kaki lima dan masyarakat a. Memberikan bimbingan terhadap pedagang kaki lima b. Dukungan terhadap pemerintah dalam menangani pkl a. Memelihara segala bentuk pemberdayaan b. Menjaga keutuhan pedagang dan masyarakat

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan kajian tentang penelitian mengenai *Empowerment Government* terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak, beberapa peneliti telah melakukan kajian yang memiliki *relevansi* dengan penelitian ini. Dari setiap penelitian yang telah dilakukan, memperlihatkan berbagai perdaan hasil baik dari aspek teori yang di gunakan maupun aspek empiris di lapangan. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menjadikan sebagai rujukan bagi penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat di amati pada tabel II.2 di bawah ini :

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu Terkait *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Trisni Utami	Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima, Suatu Alternatif Penanggulangan kemiskinan	Membahas problem pedagang kaki lima	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Riset</i> sebelumnya membahas mengenai penanggulangan kemiskinan pada pedagang kaki lima b. Metode yang di gunakan <i>participation action reserch</i>
2.	Dediek Tri Kurniawan	Konsep Pemberdayaan Pedagang Makanan Kaki	a. Persamaan dengan <i>riset</i> saya adalah sama sama membahas tentang	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokasi <i>riset</i> berada di surakarta sedangkan lokasi <i>riset</i> saya berada di siak b. Masih banyak yang harus di perbaiki dalam retribusi agar menyesuaikan dengan pendapatan pedagang

3.	Regita Nur Oktavian	<p>Lima Sebagai Potensi Wisata Kuliner</p> <p>Staregi Pemberdayaan pedagang Kaki Lima (PKL) Di sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya</p>	<p>masalah Pemberdayaa n dan pedagang kaki lima</p> <p>b. Metode yang digunakan sama yaitu kualitatif</p>	<p>a. <i>Riset</i> sebelumnya menggunakan teori konsep sementara penelitian saya menggunakan teori <i>empowerment</i></p> <p>b. Lokasi <i>riset</i> sebelumnya berada di jember sedngkan riset saya berada di kabupaten siak</p>
4.	Ibnu Sultan Suneth	Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	<p>a. Persamaan dengan riset saya yaitu sama sama membahas tentang pemberdayaa n pedagang kaki lima</p> <p>b. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif</p> <p>a. Persamaan riset terdahulu dan <i>riset</i> saya yaitu sama sama membahas mengenai pedagang kaki lima</p>	<p>a. <i>Riset</i> sebelumnya menggunakan teori strategi sementara penelitian saya menggunakan teori <i>empowerment</i></p> <p>b. <i>Riset</i> sebelumnya mengambil lokasi di taman prestasi kota surabaya sedangkan saya berada di pasar tuah serumpun kecamatan tualang perawang</p> <p>a. <i>Riset</i> sebelumnya menggunakan teori implementasi</p>

5.	Muhammad Zunaidi	Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Pasca Relokasi Dan Pembangunan Pasar Modern	<p>b. Jenis <i>riset</i> ini menggunakan metode penelitian kualitatif</p> <p>Persamaan <i>riset</i> terdahulu dengan <i>riset</i> saya adalah sama sama membahas tentang pasar dan pedagang kaki lima</p>	<p>sedangkan <i>riset</i> saya menggunakan teori <i>empowerment</i></p> <p>b. Lokasi <i>riset</i> sebelumnya berada di kabupaten sidoarjo dan <i>riset</i> saya berada di kabupaten siak</p> <p>c. Hasil dari <i>riset</i> ini yaitu pemerintah daerah membuat rancangan dimana pedagang kaki lima di letakkan di berbagai titik agar tidak terjadinya penumpukan yang membuat jalanan menjadi padat</p>
6.	Eko Adityawan Tumenggung Aji Wahyu	Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Lokasi Pada Skala Mikro Di Kota Manado	<p>Persamaan dari <i>problem riset</i> yaitu sama sama</p>	<p>a. Pada penelitian ini membahas mengenai kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca relokasi sedangkan penelitian saya membahas mengenai <i>empowerment government</i></p> <p>b. Lokasi penelitian ini berada di surabaya</p> <p>c. Hasil dari <i>riset</i> ini menjelaskan bahwa pedagang kaki lima banyak yang menolak di relokasi di karenakan karna mahal nya uang</p>

7.	Heriyanto	Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang	<p>membahas mengenai pedagang kaki lima</p> <p>a. Penelitian ini membahas mengenai pedagang kaki lima dan penelitian ini sama dengan penelitian saya</p> <p>b. Dalam penelitian ini mengkaitkan pemerintah</p>	<p>retribusi dan sewa kios yang baru</p> <p>a. <i>Riset</i> saya menggunakan teori <i>empowerment</i> sedangkan teori terdahulu menggunakan teori sensitifitas</p> <p>b. Metode penelitian terdahulu ialah kuantitatif sedangkan metode saya yaitu kualitatif</p> <p>c. Lokasi penelitian terdahulu berada di kota manado</p>
8.	Gisza Andwiyanti, Dyah Lituhayu	Implementasi Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/2016 Tentang Penetapan		<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan teori dampak sedangkan penelitian saya menggunakan teori <i>empowerment</i></p> <p>b. Metode yang dilakukan peneliti terdahulu adalah analisis inferensi dan deskriptif persentase</p> <p>c. Lokasi penelitian terdahulu berada di kota semarang yaitu di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan kota semarang</p> <p>d. Hasil <i>riset</i> menyatakan bahwa seteah adanya</p>

9.	Febra Arnita Nasution	<p>Lahan Atau Lokasi Pedagang Kaki Lima Di kota Semarang</p> <p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR. Subrantas Kota Pekanbaru</p>	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan metode yang sama dengan penelitian saya yaitu metode kualitatif</p> <p>b. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai PKL (Pedagang Kaki Lima)</p> <p>Penelitian terdahulu membahas mengenai Pedagang kaki lima dan saya juga meneliti pedagang kaki lima</p>	<p>relokasi pedagang kaki lima merasakan keuntungan dan kenaikan omset sebab tempat yang baru bersih dan aman.</p> <p>a. Riset sebelumnya menggunakan teori Implementasi sedangkan penelitian saya menggunakan teori <i>empowerment</i></p> <p>b. Lokasi <i>riset</i> terdahulu berada di kota semarang sedangkan <i>riset</i> saya berada di perawang kabupaten siak</p> <p>a. Penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan sedangkan saya menggunakan teori <i>empowerment</i></p> <p>b. Metode yang digunakan peneliti terdahulu yaitu metode kuantitatif sedangkan saya menggunakan metode kualitatif</p> <p>c. Lokasi penelitian terdahulu berada di kota pekanbaru</p>
----	-----------------------------	--	---	---

10.	Renandya Yoga Bimantara, Margaretha Suryaningih	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	<p>a. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian saya yaitu metode kualitatif</p> <p>b. Penelitian ini juga membahas tentang pedagang kaki lima</p>	<p>sedangkan penelitian saya berada di perawang kabupaten siak</p> <p>d. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak taat akan aturan dan penggunaan bahu jalan sangat berbahaya bagi pedagang maupun pengendara motor ataupun mobil dan pemerintah dan swasta akan mengupayakan agar pedagang kaki lima dapat di berikan tempat yang layak untuk berjualan.</p> <p>a. Penelitian saya menggunakan teori <i>empowerment</i> sedangkan peneliti terdahulu menggunakan teori implementasi</p> <p>b. Lokasi penelitian terdahulu berada di kabupaten magelang</p> <p>c. Hasil dari <i>riset</i> ini sangat baik yaitu penataan dan fasilitas sudah di perbarui tetapi masih ada juga pedagang kaki lima</p>
-----	---	---	--	---

				liar yang berjulalan tanpa izin.
--	--	--	--	----------------------------------

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 10 penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak, persamaan dari penelitian terdahulu yang di gunakan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teori *Empowerment*. Sedangkan perbedaannya sangat ditemukan dimulai dari indikatornya atau prinsip yang di jadikan tolak ukur dalam dalam penelitian, metode yang di gunakan dalam penelitian, objek yang dijadikan substansi atau isi dari yang di bahas kemudian di dalam penelitian. Indikator yang berbeda di tiap jurnal disebabkan karena harus adanya tolak ukur yang sesuai untuk mengukur permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Creswell (2010: 4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak. Alasannya di Kecamatan Tualang karena lokasi penelitian berada di pasar buah serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak yang mana mengenai *Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Buah Serumpun Karena Visi dari Pemerintah atau dinas Pasar adalah membuat Pasar yang Nyaman Aman dan Bersih yang sudah tertera di Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).*

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yaitu:

Tabel III.1: Informan Dalam Penelitian *Empowement Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak

No	Nama	Jabatan
1.	Wan Ibrahim	Kepala Dinas Pasar Siak
2.	Zulkifli S.Sos,M.Si	Camat Tualang
3.	Rusdi	Ketua PPKL
4.	Agus	Pedagang Kaki Lima
5.	Tania	Pedagang Kaki Lima
6.	Pak Jenggot	Pedagang Kaki Lima
7.	Aciak	Pedagang Kaki Lima
8.	Devit	Masyarakat
9.	Fadly	Masyarakat
10.	Nia	Masyarakat

Adapun teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang di pilih mengetahui serta memahami masalah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang diberikan oleh Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak.

E. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik *Interview* (wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.
- b. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta

yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian ini di rencanakan selesai dalam selama 5 bulan, dimulai dari bulan November 2019 dan selesai pada bulan Maret 2020. Adapun jadwal kegiatan penelitian tersebut dapat di lihat pada tabel III.2.

Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		November 2019				Desember 2019				Februari 2020				Agustus-September 2020				Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Rekomendasi Survei																				
6	Survei Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Komferensi Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II. Merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah kewedanan siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan Ibu Kotanya Siak Sri Indrapura. Dan saat ini Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 131 desa/kelurahan.

Tabel IV.1 : Kecamatan Di Kabupaten Siak

NO.	KECAMATAN	IBU KOTA
1	2	3
1	Siak	Kampung Dalam
2	Mempura	Sungai Mempura
3	Dayun	Dayun
4	Bunga Raya	Bunga Raya
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan
6	Sungai Apit	Sungai Apit
7	Sabak Auh	Bandar Sungai
8	Minas	Minas Jaya

9	Kandis	Telaga Sam-sam
10	Tualang	Perawang
11	Koto Gasib	Pangkalan Pinang
12	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan
13	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam
14	Pusako	Dusun Pusaka

(Sumber : Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Tabel IV.2 : Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Siak

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
1	Minas	5
2	Sungai Mandau	9
3	Kandis	11
4	Siak	8
5	Kerinci Kanan	12
6	Tualang	9
7	Dayun	11
8	Lubuk Dalam	7
9	Koto Gasib	11
10	Mempura	8
11	Sungai Apit	15
12	Bunga Raya	10
13	Sabak Auh	8
14	Pusako	7

(Sumber : Badan Pusat Statistik kabupatn Siak Sri Indrapura 2019)

Pada tabel diatas menunjukkan dimana jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Sungai Apit, Sungai Apit memiliki jumlah Desa/Kelurahan dengan jumlah 15 lalu disusul dengan kecamatan kerinci kanan yang memiliki desa/kelurahan dengan jumlah 12. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit dimiliki oleh kecamatan Minas yang berjumlah 5 Desa/Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura meliputi 8.556,09 km² yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa-rawa. Kabupaten Siak Sri Indrapura terletak pada :

- 1^o16'30 - 0^o20'49 Lintang Utara
- 100^o54'21 - 102^o14'59 Bujur Timur

Kabupaten Siak Sri Indrapura berbatas dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pelelawan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel IV. 3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak

NO	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	2	3	4
1	Minas	346,35	4,05
2	Sungai Mandau	1.493,65	17,46
3	Kandis	894,17	10,45
4	Siak	1.346,33	15,74
5	Kerinci Kanan	1.705,00	19,93
6	Tualang	128,66	1,50
7	Dayun	155,09	1,81
8	Lubuk Dalam	343,60	4,02
9	Koto Gasib	704,70	8,24
10	Mempura	232,24	2,71
11	Sungai Apit	151,00	1,76
12	Bunga Raya	437,45	5,11
13	Sabak Auh	73,38	0,86
14	Pusako	544,47	6,36

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Pada tabel diatas menunjukkan beberapa wilayah Kabupaten Siak. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kerinci Kanan dengan luas wilayah 1.705,00 km² sedangkan wilayah yang paling kecil di Kabupaten Siak dimiliki oleh Kecamatan Sabak Auh yang memiliki Luas wilayah 73,38 km².

Tabel IV. 4 : Sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Siak

NO	Nama Sungai	Muara
1	2	3
1	Sungai Siak Kecil	Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak
2	Sungai Siak	Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak
3	Sungai Penyengat	Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Sedangkan tabel di atas menunjukkan sungai-sungai yang bermuara di wilayah Kabupaten Siak. Dimana sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Siak yaitu Sungai Siak Kecil, Sungai Siak, dan Sungai Penyengat. Sungai-sungai itu pada akhirnya bermuara di beberapa Kecamatan yang ada di Siak.

B. Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 489,990 jiwa yang terdiri atas 251,32 jiwa penduduk laki-laki dan 238,67 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2019 mencapai 57 jiwa/km² dengan rata rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak pada Kecamatan Tualang dengan kepadatan sebesar 134,73 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pusako sebesar 6,26 jiwa/km². Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5 : Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2017-2019

NO	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2017	417,386
2	2018	477,670
3	2019	489,990

(Sumber : Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Angka 2019)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Siak Sri Indrapura palinh besar adalah pada tahun 2019 sebesar 489,990 jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk si Kabupaten Siak Sri Indrapura terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumberdaya ekonomi yang konstruktif memilikiarti bahwa suatu pihak sumberdaya manusia di pandag sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhdap keberhasilan pembangunan nasional,khususnya dilihat dari segi ekonomi sebagai modal potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Kenyataan laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kulaitas hidup penduduk. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan yang besar bagi para penyusun acara rencana atau kebijakan pembangunan.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Siak

Untuk melaksanakan tugas pokoknya dinas pasar kabupaten siak mempunyai fungsi yaitu :

➤ Perumusan Kebijakan Teknis Pada Dinas Pasar :

Kebijakan teknis ini dilakukan atau disusun mengacu kepada petunjuk teknis maupun aturan dan ketentuan yang telah disusun baik di tingkat provinsi ataupun pusat. Hal ini perlu dilakukan agar ketentuan dan kebijakan teknis dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan potensi serta kondisi wilayah kabupaten siak.

➤ Pemberian Pelayanan Umum :

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pasar adalah dinas yang memeberikan beberapa tugas yang bersifat pelayanan. Dalam hal pasar, seperti Pelayanan Pembangunan Pasar, Penataan Los Pasar, serta pelayanan lain yang terkait dengan pasar di wilayah Kabupaten Siak.

➤ Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Pasar :

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pasar Kabupaten Siak telah membentuk UPTD pada tiap kecamatan sebagai pembantu dan pelaksana dilapangan. Dengan pembinaan secara rutin dan berkala, maka keberadaan UPTD ditiap kecamatan sangat membantu terhadap pelaksanaan tugas

dinas dalam mendistribusikan kebijakan daerah. Selain itu juga dapat mempersingkat waktu dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

➤ **Pengelolaan Urusan Kesekretarian Dinas**

Dalam hal ini bersifat lebih internal, lebih kepada penatausahaan (administrasi) yang baik dan benar, pembinaan karir dan disiplin pegawai guna mengimplimentasikan *Good Governance*.

D. Visi dan Misi Dinas Pasar Kabupaten Siak

visi merupakan suatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu instansi akan di arahkan tetap konsiste dan tetap eksis, antisipatif, serta inovatif atau dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantangtentang keadaan masa depan yang ingin di wujudkan.

Visi dari dinas pasar siak yaitu :

“terwujudnya pasar yang aman, tertib dan berbudaya dalam lingkungan masyarakat dan bersih dan sehat dalam mencapai tujuan pelayanan publik”.

Sedangkan misi dari Dinas Pasar yaitu :

1. Mewujudkan Pasar yang Aman, Tertib dan Berbudaya
2. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Bersih dan Sehat
3. Mewujudkan Lingkungan yang Bersih dan Sehat dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau

E. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Siak

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, maka Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Siak Terdiri Dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengolahan Pasar, Membawahi :
 - a. Kepala Seksi Operasional Pasar dan Restribusi
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Pasar
 - c. Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar
4. Kepala Bidang Kebersihan dan Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Kepala Seksi Penyuluhan dan Kebersihan Lingkungan
 - b. Kepala seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak, Kasi Tramtib Kecamatan Tualang, Pedagang Kaki Lima dan juga Masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data dari penelitian ini maka, penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	5	50%
2	Perempuan	5	50%
jumlah		10	100%

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara di lapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

NO	Umur	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	33-38	2	20%
2	39-44	3	30%
3	45-50	3	30%
4	51-56	2	20%
Jumlah		10	100%

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

3. Identitas Responden Berdasarkan Singkat Pendidikan

Dari hasil wawancara di lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	6	60%
2	Strata Satu	4	40%
Jumlah		10	100%

(sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

B. *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan pemberdayaan pemerintahan yang dilakukan dinas pasar kabupaten siak yang mana program ini di lakukan oleh beberapa pihak yaitu dari pemerintah dan kelompok dagang dan juga masyarakat yang mana program yang di lakukan oleh Dinas Pasar Siak belum seutuhnya bisa dikatakan terlaksana dengan baik dan berjalan lancar dan berharap agar pemberdayaan ini bisa dapat berjalan dengan baik san dapat mencapai tujuan demi masa depan yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di pasar buah serumpun di perlukan adanya peran atau kerjasama antara pihak atau pemrintah dan juga masyarakat sehingga program pemberdayaan yang di laksanakan dapat tercapai dan tujuan yang diinginkan selaras dengan peraturn yang sudah di ditetapkan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan banyak juga di temu hambatan hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Program pengembangan kinerja pasar merupakan progam yang dijalankan oleh Dinas Pasar Kabupaten Siak, dimana program ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun,mengembangkan, mensejahterkan pedegang kaki lima tersebut. Dalam program pengembangan kinerja pasar tersebut kita dapat memperhatikan bagaiman hubungan antara pihak pemerintah, lalu pedagang kaki lima dan juga masyarakat dalam pemebrian hak dan juga

kewajiban dan keikutsertaan kebijakan dengan adanya program pengembangan kinerja pasar ini, sehingga program ini dapat terselenggara dengan baik.

Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan juga Pemeliharaan merupakan hal yang harus di perhatikan dalam penelitian ini. Pemahaman mengenai *Empowerment Government* juga harus dimiliki oleh setiap pelaksana program pemberdayaan di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Wilayah Kabupaten Siak Siak merupakan Suatu daerah yang merupakan daerah yang saat ini sedang berkembang. Perkembangan tersebut tidak lepas dengan adanya pelaku usaha mikro atau pedagang kaki lima yang membuat pendapatan daerah yang baik dan dapat memajukan sektor ekonomi daerah.

Untuk melihat jawaban dari informan tentang *Empowerment Government* Terhadap Pedagang Kaki Lima Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang Kabupaten Siak dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Pemungkinan

Pemungkinan adalah suatu cara menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Dengan adanya pemungkinan ini juga dapat kita bagaimana perkembangan terhadap pihak yang menjalankan program ini , apakah terjadi peningkatan atau tidak dalam proses program yang dilaksanakan.

a. bentuk-bentuk program pemberdayaan yang di berikan Dinas Pasar terhadap pkl sudah terealisasi.

Dalam hal ini pemungkinan yang di lakukan oleh pemerintah dan pihak lainnya merupakan bentuk dari upaya terlaksana nya program pengembangan kinerja pasar yang mana jika bentuk program yang di berikan oleh Dinas Pasar sudah terealisasi hal ini bisa dapat dikatakan bagus, karena sulitnya dalam menyatukan pikiran antara pedagang dan juga pemerintahan daerah yang bisa saja mengagalkan program yang akan di laksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak menyatakan bahwa :

“Pihak dinas pasar selalu mensosialisasikan terhadap pedagang kaki lima mengenai apa saja bentuk pogram pemberdayaan yang di berikan terhadap pedagang kaki lima dan dinas pasar juga sudah melkukan hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program pemberdaayan pasar contohnya dalam hal ini dinas memberikan kesempatan bagi pkl yang ingin berjualan di pasar tuah serumpun jika kemungkinan masih ada lapak yang kosong maka iya di berikan lapak sesuai yang ada dan juga di berikan sosialisasi dalam berjualan tidak boleh memakan jalan dan juga trotoar. “(5 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tramtib Kecamatan Tualang mengatak bahwa :

“Perihal keikutsertaan pihak kecamatan tualang dalam progrem pengembangan kinerja pasar bahwa kecamatan telah memeberikan kesempatan terhadap pkl yang ingin berjualan di pasar tuah serumpun yang mana dalam hal ini kecamatan memebrikan kebijakan terhadap pedagang dapat berjualan di pagi hari dan memkai jalan untuk berdagang di berikan waktu sampai jam 11 siang setelah itu tidak ada lagi yang berjualan di jalan maupun trotoar hal itu merupakan bentuk keringanan

yang di berikan pihak kecamatan bagi pedagang kaki lima''. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PPKL mengatakan

bahwa :

''Dinas pasar dan juga pihak kecamatan sudah memebrikan sosialisasi dan arahan yang baik dalam bentuk program pemberdayaan yang di berikan terhadap pedagang kaki lima dan saat ini pkl sudah tidak lagi berebut lapak dalam berjualan dan iya menyebutkan bahwa pasar tuah serumpun sangat maju dalam hal pengembangan ekonomi''. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Masyarakat mengatakan

bahwa :

'' Menurut masyarakat dan warga setempat mengatakan bahwa program yang di berikan kepada pedagang yang ada di pasar tuah serumpun merupakan langkah yang sangat tepat dimana pasar tuah serumpun adalah pusat dari sumber daya ekonomi masyarakat perawang''. (6 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama beberapa informan seperti Kepala Dinas Pasar, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL, dan juga Masyarakat penulis dapat menganalisis dari hasil wawancara diatas bahwa dari prinsip indikator ini sudah di laksanakan dengan baik dan secara maksimal. Di katakan sudah berjalan dengan baik yaitu dari segi perekonomian masyarakat atau pedagang sudah baik dan tidak ada kerugian yang di timbulak dari program pemberdayaan nya dan juga pedagang tidak merasa kebingungan dengan program yang di buat oleh Dinas Pasar.maka dari hasil wawancara ini bisa di katakan indikator pemungkinan yang di lakukan sudah berjalan denga baik dan terlaksana.

B. kendala dalam program pemberdayaan terhadap PKL

Dengan adanya peningkatan dari pemungkinan yang di lakukan dari semua pihak terkait maka bisa di katakan program ini sudah berjalan dengan lancar dan semestinya. Karena program yang di buat di peruntukan bagi pedagang kaki lima dan juga masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak :

“ Untuk mengenai kendala sangatlah minim paling hanya hal hal kecil seperti lapak yang di berikan terlalu kecil sarana dan prasarana yang di butuhkan kurang hal ini tidak menjadi masalah besar bagi pedagang dan masih dapat di terima “ (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Tramtib Kecamatan Tualang :

“ Dalam pemberdayaan yang sudah di lakukan hal atau kendala yang di alami pemerintah daerah tidaklah terlalu banyak contohnya saja masalah padatnya pedagang yang ada di pasar tuah srtumpun membuat lapak makin lama terasa sempit dan saat ini pemerintah daerah dan phak terkait sudah membuat aturan yang mana PKL mendapat jatah ukuran lapak sesuai yang di tetapkan” (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ketua PPKL Kecamatan Tualang iya mengatakan :

“Survei yang di lakukan di lapangan dan kaduan kaduan masyarakat memang mengenai lapak dan dala hal lain tidak ada kendala yang berat karena pedagang sudah saling mengerti dan memahami satu sama lainnya” (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat ia mengatakan bahwa :

“ Masyarakat tidak terlalu merasakan adanya kendala hanya saja dengan kebijakan yang di buat dinas pasar membuat jalanan sedikit penuh dan terkadang juga macet tapi itu tidak terlalu di permasalahan”. (6 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis dengan Kepala Dianas Pasar Siak, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL Kecamatan Tualang dan juga Masyarakat program kinerja pasar yang di buat oleh kepala dinas pasar tidaklah banyak kendala hal ini memungkinkan bahwa program ini sudah sangat baik dan berjalan dengan baik karena hanya beberapa pihak saja yanag melaporkan adanya masalah di dalam pasar selain itu tidak ada maka dari itu pedagang dan masyarakat tidak ada merasa di rugikan satu sama lain.

2. Penguatan

Penguatan yaitu segala bentuk respon yang bertujuan untuk memeberikan informasi ataupun umpan balik atas suatu perbuatan atas respon yang di berikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan di dalam program ini juga sebagai faktor penting dalam penelitian ini karena memberikan kemudahan bagi suatu kelompok ataupun individu untuk memperoleh informasi.

Karena informasi yang harus di miliki penulis harus jelas dan kuat datanya maka dalam penguatan sangat di butuhkan dalam peneltian pemberdayaan ini agar bisa mendapatkan infosmasi yang akurat dan actual.

- a. Adanya kemudahan dalam melakukan sosialisasi dan juga apakah sudah berjalan dengan baik program yang di lakukan**

Dalam melakukan sosialisasi yang tepat harus dengan informasi yang jelas dan juga tidak bersifat rahasia. Dengan demikian dalam menjalankan Program Pengemangan Kinerja Pasar di Kecamatan Tualang maka perlu ada sosialisasi yang harus di lakukan secara baik dan benar agar menjadi satu kesatuan tanpa menimbulkan konflik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak ia mengatakan :

“Dinas pasar sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi dengan metode tatap muka dan juga langsung ke lokasi yang mana pemberdayaan ini di lakukan demi membuat pasar tuah serumpun menjadi pusat perekonomian masyarakat yang maju oleh itu pihak terkait selalu memaksimalkan sosialisasi kepada pedagang dan juga masyarakat agar salah satu pihak tidak ada yang merasa di rugikan”. (5 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tramtib Kecamatan Tualang ia mengatakan :

“Dinas pasar dan juga pemerintah daerah sudah memberikan sosialisasi setiap sebulan sekali agar pedagang tetap mengikuti aturan yang sudah di tetapkan dalam berjualan dan tidak menimbulkan masalah di area pasar pemerintah daerah juga selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pedagang agar pasar tuah serumpun bisa jadi pasar yang berkembang” (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PPKL ia mengatakan :

“Selama PPKL di bentuk sosialisasi di berikan kepada pedagang dan juga ketua PPKL agar PPKL bisa membantu dan bisa bekerja sama dalam pemberdayaan pasar tuah serumpun” (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat dan pedagang ia mengatakan :

“Ketika pagi hari beberapa masyarakat dan pedagang sering juga mendapatkan pengarahannya yang diberikan pemerintah daerah karena pihak kecamatan selalu ada di pasar melihat situasi dan kondisi yang terjadi di pasar tua serumpun”(6 oktober 2020)

Hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL Kecamatan Tualang, Pedagang dan juga Masyarakat, penulis dapat menganalisis bahwa disini sosialisasi mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima sudah cukup jelas dan dapat dimengerti dan berjalan dengan lancar dan baik dan sosialisasi dilakukan secara rutin agar pedagang tidak ada problem antar sesama pedagang dan juga pemerintah.

b. Hal-hal yang harus ditegaskan dalam melakukan sosialisasi dalam pemberdayaan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima

Adanya hal-hal yang harus ditegaskan dalam melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima yang mana tidak mudah memberikan sosialisasi dengan cara tatap muka atau survei lapangan karena pedagang sudah pasti sibuk melayani pembelinya dengan adanya program ini maka pedagang dan juga pemerintah bisa membantu perekonomian daerah yang dikelola.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Dinas Kabupaten Siak ia mengatakan :

“Hal yang harus ditegaskan dalam melakukan sosialisasi terhadap pedagang yaitu bagaimana cara pedagang dapat saling mengerti antara pedagang satu dan pedagang lainnya supaya tidak terjadi selisih paham, pedagang juga diberi tahu batas-batas lapak yang diberikan hanya bisa dapat satu lapak dalam berjualan tidak bisa lebih kepala dinas juga

mengatakan pemberdayaan ini di lakukan untuk kepentingan bersama bukan untuk satu pihak saja dan juga harus bisa menjaga kebersihan dan juga kemanan di dalam wiayah pasar tuah serumpun” (5 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhdapat Tramtib Kecamatan

Tualang ia mengatakan :

“Pemberdayaan pedagang kaki lima harus di lakukan semaksimal mungkin karena ini meyangkut perekonomian masyarakat oleh karena itu pemerintah daerah harus selalu memberi penyuluhan atau sosialisasi dalam berdagang di pasar tuah serumpun terutama dalam penggunaan lapak yang di beikan harus bisa di jaga kebersihan dan keamanannya” (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Ketua PPKL Kecamatan

Tualang ia mengatakan :

“Hal yang harus di tegaskan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu bagaimana cara pemerintah memberikan solusi terbaik dalam melakukan penataan dan memeberikan sarana dan pra sarana yang ada di pasar tuah serumpun”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Pedagang dan Masyarakat

ia mengatakan :

“Pedagang ingin pemerintah lebih memperhatikan lapak lapak liar yang banyak memakan tempat dan tidak bayar sewa lapak dan juga sarana dan pra sarana harus lebih lengkap dan juga masyarakat ingin pemberdayaan yang di lakukan pemerintah berjalan dengan baik karena kawasan pasar ruah serumpun sangat padat pagi, siang dan malam oleh karena itu penting menata pkl yang berjualan di pinggir jalan”. (6 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL Kecamatan Tualang dan juga Pedagang dan Juga masyarakat penulis dapat menganalisis bahwa pihak Dinas Pasar sudah memberikan pembinaan seperti sosialisasi yang di lakukan secara

rutin bagi pedagang yang berjualan di pasar buah serumpun dan pemerintah daerah juga sama halnya memberikan pelayanan yang baik dalam melakukan pembinaan bagi pedagang pemerintah daerah dan dinas terkait sangat terbuka dalam memberikan penyuluhan dan tidak merugikan pihak yang ada di dalam program pemberdayaan tersebut. Dinas pasar juga selalu menegaskan kepada para pedagang yang berjualan di pasar buah serumpun agar selalu melaksanakan aturan atau kebijakan yang di buat oleh Dinas Pasar Kabupaten Siak dan juga Pemerintah daerah yang mengawasi langsung program pemberdayaan ini.

3. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud disini adalah bagaimana cara suatu instansi pemerintah dalam melakukan perlindungan atas kebijakan yang telah di buat dan juga melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak yang berkaitan dalam suatu kebijakan yang telah di buat maka dari itu perlindungan juga sangat penting di dalam indikator penelitian ini.

a. Perlindungan yang di berikan Dinas Pasar Kabupaten Siak dan juga Kecamatan Tualang

Hal ini sangat perlu di perhatikan dalam pelaksanaannya, karena jika sampai program ini di laksanakan tidak tepat maka yang terjadi adalah kesalahan pemahaman yang bisa berujung ke hal hal yang tidak diinginkan maka dari itu ini sangat di butuhkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak ia mengatakan :

“Dalam hal perlindungan harus sangat di perhatikan jika terjadi kesalah pahaman di dalam pemberdayaan pkl ini maka akan bisa terjadi konflik yang tidak di inginkan maka dari itu dinas terkait juga selalu memastikan program yang di lakukan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan tidak ada tumbang tindih antar pihak satu dan yang lainnya dinas pun juga selalu memikirkan keamanan dan kenyamanan pedagang kaki lima yang berjualan di pasar buah serumpun”. (5 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tramtib Kecamatan Tualang ia mengatakan :

“Kemanan dan kenyamanan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun sangat di perhatikan karena ini menyangkut benda benda yang mereka jual harus terjamin keamanannya dan pemerintah daerah juga sudah memberikan keamanan yang di butuhkan para pedagang seperti penjagaan alat-alat yang di titip di lapak di jaga oleh beberapa pihak yang juga sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga dinas seperti pemuda setempat dan anggota PPKL”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PPKL Kecamatan Tualang ia mengatakan :

“Bahwasanya kemanan dan kenyamanan yang di dapat oleh pedagang kaki lima berkat adanya kerja sama anatar kelompok pedagang dan juga dinas yang bersangkutan memahami aa saja yang di butuhkan dalam menjaga keamana yang di butuhkan di pasar buah serumpun hal itu juga dengan adanya persatuan pedagang kaki lima yang jelas sudah banyak membantu dalam penjagaan barang di pasar agar tidak hilang di malam hari”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pedagang dan Masyarakat ia mengatakan :

“Saat ini dinas pasar dan kecamatan serta ppkl sudah melaksanakan tugasnya dengan baik karna jarang sekali adanya laporan yang buruk yang di tujukan kepada dinas paar dan juga kecamatan karena keamanan dan perlindungan yang di lakukan sudah tepat dan juga tidak ada yang aling merugi antara pedagang dan juga masyarakat kebijakan yang di buat untuk meningkatkan keamanan pasar juga sudah terlaksana dengan baik”. (6 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL Kecamatan Tualang, Pedagang Kaki Lima dan juga Masyarakat diatas, penulis dapat menganalisis bahwa untuk tanggung jawab perlindungan terhadap PKL sudah di sesuaikan dengan apa yang di butuhkan dan juga untuk saat ini belum ada nya komplain dari pedagang untuk keamanan dan kenyamanan dan hal itu cukup baik bagi Dinas Pasar yang dapat mengelola dan mengerti apa saja hal yang harus di butuhkan di dalam perlindungan Pasar Buah Serumpun, maka dari itu untuk saat ini bisa di katakan perlindungan yang di berikan cukup efektif dan juga membuat pedagang dan masyarakat merasa aman dan nyaman.

4. Penyokongan

Penyokongan yaitu memberikan suatu bimbingan dan dukungan untuk mendapatkan suatu informasi lebih sehingga mampu memanfaatkan peluang, dalam program pemberdayaan yang di lakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Siak bimbingan yang saat ini di berikan yaitu bagaimana cara agar pedagang dapat berjualan dengan tertib karena pasar ini berada di jlan raya maka dari itu sangat penting menjaga ketertiban umum yang ada di pasar buah serumpun, dan juga pemerintah daerah juga memberikan selalu arahan agar pedagang selalu menjaga kersihan yang ada di pasar.

a. kerjasama antara Dinas Pasar dan Pemerintah Kecamatan Tualang dalam memberikan bimbingan kepada pedagang kaki lima

Dalam program pemberdayaan sangat di butuhkan yang namanya bimbingan atau arahan bagi individu atau kelompok yang di tuju oleh karena itu penting adanya penyokongan yang selalu di berikan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di pasar buah serumpun.

Maka dari itu penyokongan sangat penting di lakukan agar pedagang dapat mengerti program pemberdayaan yang di berikan oleh Dinas Pasar dan juga Pemerintahan Daerah Kecamatan Tualang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak ia mengatakan :

”Dinas Pasar Kabupaten Siak sudah memberikan arahan dan juga bimbingan kepada pedagang kaki lima pasar buah serumpun agar dapat berjualan secara tertib aman dan juga bersih agar pedagang dan juga masyarakat dapat merasakan kenyamanan yang ada di pasar buah serumpun, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan dinas pasar agar program pemberdayaan ini dapat berjalan secara baik dan juga lancar tanpa adanya kendala”. (5 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tramtib Kecamatan Tualang ia mengatakan bahwa :

“Dengan adanya program ini maka pemerintah kecamatan tualang juga membantu tugas dari dinas pasar dengan arahan dan bimbingan yang di berikan dan hal itu berjalan dengan baik dan dapat di terima oleh pedagang dan juga masyarakat” (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PPKL Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Sosialisasi dan bimbingan yang di berikan oleh Dinas Pasar dan Juga Kecamatan Tualang memberikan angin segar yang baik pada pedagang kaki lima hal itu dilihat dengan bertambahnya pedagang kaki lima yang ingin berjualan di pasar buah serumpun, dan pedagang juga meraakan adanya perhatian dari pemerintah yang juga memberikan arahan dan bimbingan pada pedagang kaki lima”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pedagang Dan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Dengan adanya arahan yang di berikan dinas pasar dan juga pihak kecamatan membuat pasar lebih terasa aman dan nyaaman dan pedagang juga tidak pernah melakukan komplain yang berlebih kepada pihak yang berkaitan”. (6 Oktober 2020)

Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini melalui wawancara terhadap Dinas Pasar Kabupaten Siak, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL Kecamatan Tualang, Pedagang Kaki Lima dan juga Masyarakat diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya bimbingan dan arahan yang di berikan oleh pihak terkait maka dengan hal ini pedagang kaki lima sudah menngerti akan kemandirian dan kenyamanan di dalam pasar dan pedagang juga sadar akan kebersihan lapaknya masing masing agar tidak mengotori jalan raya oleh karena itu penyokongan atau bimbingan yang di berikan oleh Dinas Pasar dapat di mengerti dan di pahami oleh pedagang hal itu bisa di lihat dari faktor terjaganya kemandirian dan kenyamanan yang ada di pasar.

b. Adanya kemajuan yang di rasakan oleh pedagang dengan adanya perhatian dari Pemerintah Daerah dan juga Dinas Pasar

Dengan adanya program pemberdayaan yang di lakukan oleh dinas pasar untuk mengembangkan kinerja pasar, sangat di butuhkan bagi pedagang kaki lima karena saat ini pasar buah serumpun menjadi salah satu pasar harian yang selalu

ramai para pembeli, oleh karena itu langkah yang di lakukan oleh Dinas Pasar dan juga Pemerintah Daerah Kecamatan Tualang sangatlah tepat dengan adanya pemberdayaan yang di lakukan membuat pasar menjadi lebih di perhatikan kondisinya.

Maka dari itu penyokongan yang di lakukan adalah salah satu langkah yang baik dalam memberdayakan pedagang kaki lima agar merka paham akan program pemberdayaan yang di berikan atau di laksanakan oleh Dinas Pasar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak mengatakan :

“Hasil dari penyokongan yang di lakukan oleh pihak yang berkaitan dengan pasar yaitu dapat di lihat dari sarana dan prasarana yang ada di pasa sudah tersedia dan jika ada kekurangan maka pedagang dapat komplain kepa dinas pasar, pemerintah juga sangat membantu dalam mensosialisasikan program pemberdayaan yang di buat oleh kepala dinas pasar agar pasar tuah seumpun dapat menjadi pasar yang bisa mensejahterakan pedagang kaki lima nya”. (5 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tramtib Kecamatan Tualang mengatakan :

“Dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan yang tepat terhadap pedagang kaki lima maka kita bisa membuat mereka mengerti apa hal yang harus di lakukan agar tempat mereka berjualan dapat di tempati secara aman, nyaman tidak ada gangguan dari pihak pihak lain dan itu bisa di liat dari sedikitya hanya sekian persen kesalahpahaman yang ada di pasar dan itu meminimalisir adanya konflik yang terjadi di pasar”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua PPKL Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Pedagang kaki lima saat ini merasakan adanya perbedaan berjualan yang dulu dengan sekarang, dulu banyaknya pkL yang berjualan membuat dgangan yang lainnya tidak laku, dan dengan pemberdayaan yang sekarang malah omset dari pedagang kaki lima lumayan meningkat dengan adanya penataan yang di lakukan oleh Dinas Pasar dan juga Pemerintah Daerah”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penuli dengan Pedagang dan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Saat ini pasar sudah lebih baik dari sebelumnya karena dengan adanya arahan yang di berikan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dan kebersihan yang ada di pasar, pedagang pun lebih bisa tertata dari sebelumnya, dan juga dari pandangan masyarakat berbelanja di pasar tuah seumpun sekarang lebih bisa di katakan mudah mencari apa yang kita cari karena sekarang sidah luamayan tertata yang berdagang”. (6 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Kabupaten Siak, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL Kecamatan Tualang, Pedagang Kaki Lima Pasar Tuah Serumpun dan juga Masyarakat di atas dapat di analisis bahwa dinas pasar dan juga pemerintah daerah telah bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat dengan adanya program pengembangan pasar maka disini mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan bimbingan agar pelaku usaha atau pedagang yang ada di pasar tuah serumpun dapat membantu menjalankan program pemberdayaan pasar tuah serumpun. Jadi jika penyokongan tidak di lakukan bisa saja pedagang liar bisa membuat aturan sendiri dalam membuat lapak liar dan berdagang dan dapat menyebabkan suatu masalah yang ada di pasar tuah serumpun.

5. Pemeliharaan

Di dalam program pemberdayaan kita juga membahas pemeliharaan yang di lakukan di dalam program pemberdayaan yaitu cara memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan.

Oleh karena itu pemeliharaan sangat penting dalam pemberdayaan kaena dapat memantau bagaimana hasil pemberdayaan yang telah di lakukan oleh pemerintah.

a. **Bentuk pemeliharaan yang di lakukan Pemerintah terhadap pedagang kaki lima di pasar buah serumpun**

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Siak mengatakan :

“Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan juga selalu memperhatikan pemeliharaan dalam pemberdayaan tersebut dalam hal pemeliharaan yaitu bagaimana pemerintah memberikan bentuk arahan dalam selalu menjaga kebersihan dan juga tempat berdagang agar selalu bersih dan juga aman tanpa adanya tindakan yang tidak di inginkan oleh pedagang dan juga pemerintah maka dari itu selalu di perhatikn dalam hal pemeliharaan ini”. (5 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tramtib Kecamatan Tualang mengatakan :

“Dalam melakukan pemberdayaan jelas saja juga adanya pemeliharaan karena dalam pemberdayaan yang di lihat bukan hasil awalnya saja melainkan hasil jangka panjang nya apakah pemberdayaan ini bisa terlaksana terus atau tidak, oleh karena itu pemerintah juga selalu menghimbau agar dinas terkait dan juga pedagang juga selalu melaksanakan kebijakan yang di berikan dan juga memelihara hal hal

yang berkaitan di dagangan masing masing, bentuk pemeliharaan yang di berikan yaitu selalu memebrikan arahan dan solusi secara lisan dan langsung agar dapat di pahami oleh pedagang”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ketua PPKL Kecamatan

Tualang mengatakan :

“Bentuk pemeliharaan yang di lakukan pemerintah dan juga dinas terkait yaitu berbenuk arahan dan juga alat kebersihan agar pedagang dapat memperhatikan selalu kebersihan dan juga keamanan di dalam pasar”. (6 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Pedagang dan Masyarakat

mengatakan :

“Pedagang merasa bahwa pasar buah serumpun sangat di perhatikan dalam pemberdyannya sebab pasar ini selalu ramai dan juga menjadi salah satu sektor perekonomian masyarakat perawang, dan juga masyarakat merasakan hal yang sama karena gampang sekali mencari apa yang di cari sebab pemerintah sudah mengatur penataan pedagang sesuai dengan jualannya”.(6 Oktober 2020)

Hasil analisis yang didapat oleh penulis melalui wawancara bersama

Kepala Dinas Pasar Kabupatn Siak, Tramtib Kecamatan Tualang, Ketua PPKL

Kecamatan Tualang, Pedagang Kaki Lima dan juga Masyarakat dapat di analisi

bahwa masing masing para informan sudah merasakan dampak dari

pemberdayaan terhadap pasar buah serumpun karena dalam pemeliharaannya

pemerintah selalu memfokuskan bagaimana keamanan kenyamanan pedagang dan

juga masyarakat dapat di rasakan, karena dengan betuk pemelharan yang di buat

oleh pemerintah pedagang bisa merasakan hal positif yang dirasakan selama

berjualan.

3. Hambatan yang di hadapi dalam pemeliharaan program pengembangan kinerja pasar (pasar tuah serumpun)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada *Empowerment Government* dalam melakukan suatu program yaitu program pemberdayaan maka tentu saja banyak hambatan hambatan yang di rasakan oleh pemerintah dan juga dinas terkait :

1. Sulitnya dalam berkomunikasi terhadap pedagang dalam melakukan pendekatan karena pada saat pemerintah melakukan sosialisasi di situ pedagang juga melayani pembeli maka dari situ terkadang pedagang juga kurang mengerti apa yang di maksud pemerintah, akan tetapi hal itu bisa di biasakan dan lama kelamaan pedagang bisa mnegerti apa yang di maksud pemerintah dalam hal mengembangkan kinerja pasar tuah serumpun
2. Adanya beberpa pedagang yang masih belum paham dan mengerti yang di maksud pemberdayaan hal ini juga menghambat bentuk pemeliharaan dan juga pemberdayaan pemerintah terhadap pedagang kaki lima karena melakukan pemeliharaan ini harus di mengerti dan juga di kerjakan semua oleh pedagang karena mereka yang memiliki lapak harus paham apa saja yang harus di perhatikan dalam berjualan agar tidak mengotori dan juga memkai fasilitas umum yang ada di daerah pasar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. *Empowerment Government* dalam program pengembangan kinerja pasar yang berada di Kabupaten Siak belum terlaksana dengan baik melihat perkembangan yang saya liat pada saat turun kelapangan di mana pihak pemerintah masih kurang memberikan fasilitas yang di butuhkan para pedagang kaki lima seperti meja, kursi dan lapak, Pemerintah Kecamatan Tualang bekerjasama dengan Dinas Pasar Kabupaten siak melakukan tugas dengan apa yang di perintahkan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan hal ini sangat di tanggapi secara positif oleh pedagang kaki lima dan juga masyarakat atas pemberdayan yang di lakukan di pasar tuah serumpun.

2. Pada *Empowerment Government* dalam pengembangan kinerja pasar di Kabupaten Siak masih belum terlepas dengan adanya hambatan-hambatan yang di rasakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program tersebut, karena dengan banyaknya populasi pedagang kaki lima di pasar tuah serumpun membuat

pemerintah beserta dinas terkait juga merasakan hambatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut antara lain :

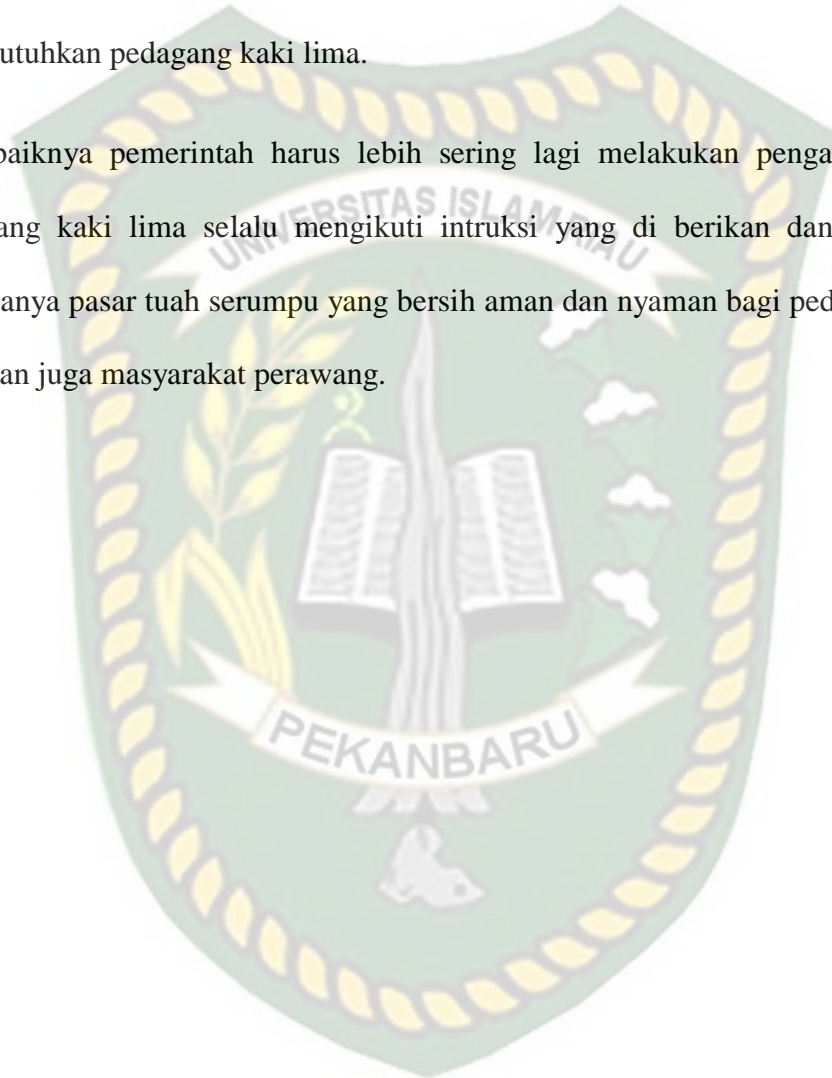
- a. sulitnya dalam memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima karena pedagang sibuk berjualan dan terkadang tidak mendengarkan sosialisasi yang di berikan.
- b. masih sulitnya pedagang dalam memahami apa yang di maksudkan dalam program pemberdayaan yang di lakukan dinas pasar dan terhadap aturan yang berlaku
- c. kurangnya koordinasi antara pemerintah dan juga pedagang menjadi hambatan dalam program pemberdayaan pengemabagan kinerja pasar tuah serumpun

B. Saran-saran

1. Sebaiknya pemerintah dan juga dinas terkait harus lebih memfokuskan bagaimana caranya agar di dalam melaksanakan program ini lebih bisa memberikan informasi dan juga sosialisasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalah pahaman antara pedagang dan juga pemerintah.
2. Sebaiknya pihak pemerintah juga memaksimal kan apa yang di butuhkan dalam program pemberdayaan ini sebab program pengembangan pasar salah satu cara bentuk kemajuan di dalam ekonomi masyarakat di daerah kecamatan tualang.
3. Sebaiknya pedagang kaki lima dan juga ketua PPKL bisa berkoordinasi lebih baik lagi dalam memajukan pasar tuah serumpun dan selalu memantau dan memberikan teguran jika pedagang tidak mengikuti aturan yang telh di buat.

4. Sebaiknya masyarakat juga lebih bisa turut andil dalam pelaksanaan program pengembangan pasar ini karena peran masyarakat juga di butuhkan karena pedagang kaki lima membutuhkan masyarakat dan juga sebaliknya masyarakat membutuhkan pedagang kaki lima.

5. Sebaiknya pemerintah harus lebih sering lagi melakukan pengarahan agar pedagang kaki lima selalu mengikuti intruksi yang di berikan dan juga agar terciptanya pasar buah serumpu yang bersih aman dan nyaman bagi pedagang kaki lima dan juga masyarakat perawang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Suharto, Edi (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika aditama.
- Creswell, John W (2016), *“Research Design” Pendekatan metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto poerwoko (2017), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam prespektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Abdul, Wahab, (2008) „Pengantar Analisis Kebijakan Publik“ . Malang: UMM Prees
- Adinda Sukma Novelia, Sardjito. (2015) Kroteria Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima berdasarkan Preferensi Pedagangnya di Kawasan Perkotaan Sidoardjo . *Jurnal Teknik ITS Vol. 4*.
- Adityawan Tumenggung Zees Arsitektur, Eko, and JI A A Wahab No. 2018. 1 *SENSITIFITAS PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP LOKASI PADA SKALA MIKRO DI KOTA MANADO*.
- AG.Subarsono, (2005) “Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo, (2008). “Dasar-Dasar Kebijakan Publik”. Bandung : Alfabeta.
- Ambarwaty, S. H. (2003). *Study Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang Kosong di Kota Salatiga*. Semarang.
- Andwiyanti, Gisza, Dyah Lituhayu, and Jurusan Administrasi Publik. *PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG*. <http://fisip.undip.ac.id>.
- Hamidjojo, K. (2004). *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki*

- Lima di Surakarta*, . Semarang: Tesis Magister Administrasi Publik, UNDIP.
- Kurniawan, Dediek Tri. 2013. “Konsep Pemberdayaan Pedagang Makanan Kaki Lima Sebagai Potensi Wisata Kuliner (Studi Kasus Pedagang Makanan Kaki Lima Di Kawasan Universitas Jember).” *Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013*: 696–709.
- Moleong J, Lexy, (2005) „*Metodologi Penelitian Kualitatif*“ . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, A. A. (2008). *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang : Ins-TRANS Publishing.
- Nazarudin, Padmo Wijoyo, (2011) „*Pengantar Ilmu Politik*“ . Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nazir, Moh, (2005)„*Metode Penelitian*“ . Bogor Selatan : Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid, (2011) „*Metode Penelitian Kualitatif*“ Jakarta: Alfabeta CV.
- Pramudita, D. (2004). *Perencanaan Strategis bagi PKL di Pasar Baru Bekasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subejo & Supriyanto. (2004). *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sugiantoro, E. A. (2013). Sensitifitas Pedagang Kaki Lima Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Skala Mikro di Kota Manado. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota, Vol.2.Nomor 3, ITB Bandung*.
- Susilo, A. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi PKL Menempati Bahu jalan di Kota Bogor*. Jakarta: Pasca Sarjana Perencanaan dan kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Utami, Trisni. 2010. “Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (Pkl), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan.” *Jurnal Sosiologi* 25(2): 114–23.
- Wahyu, Aji, Heriyanto * Jurusan, Ekonomi Pembangunan, and Fakultas Ekonomi. 2012. 1 EDAJ *Economics Development Analysis Journal*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Effendy, Onong Uchjana 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta

Nugroho, 2008. *Partisipasi Masyarakat Desa*. Andi : Yogyakarta

Hanif Nurcholos, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2004.

Inu Kencana Syafei, 2005, *Ilmu Administrasi Publik* Rineka Cipta, Jakarta.

C. Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 9822 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Dandi Jimpramanda
NPM : 167310146
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Empowerment Government Terhadap Pedagang Kaki Lima
Pasar Buah Serumpun Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak
Persentase Plagiasi : 23 %
Jumlah Halaman : **82 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 November 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230